



Budaya Filantropi Indonesia: Rekonstruksi untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan



TIM PENYUSUN

Tim Penulis

Amelia Fauzia
Bhirawa Anoraga
Sri Hidayati

Tim Pengulas

Rizal Algamar
Gusman Yahya
Dinda Sonalokas Asghar

Desain Cover dan Tata Letak

Kasyfiyullah

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Filantropi Indonesia
Jakarta, 2025
Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720
E-mail: info@filantropi.or.id
Telp. (021) 6287234

Dilarang menggandakan atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi makalah ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, dalam bentuk apapun, termasuk cetak, digital, maupun media lainnya.

Kata Pengantar

Dalam beberapa dekade terakhir, budaya kedermawanan di Indonesia terus menunjukkan daya hidup dan relevansinya. Budaya gotong-royong, bersedekah, dan zakat tidak lagi sekadar tradisi, melainkan telah bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang terorganisir dan strategis. Filantropi yang dahulu bersifat spontan kini berkembang menjadi instrumen penting dalam pembangunan, melampaui fungsi karitatifnya dan mengambil peran kunci dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, di tengah kompleksitas tantangan zaman, transformasi ini perlu diiringi dengan upaya bersama untuk merekonstruksi budaya filantropi secara sadar untuk menyusun ulang nilai, prinsip, dan arah gerak filantropi Indonesia. Hanya dengan membangun ekosistem yang inklusif, akuntabel, berdampak positif, dan berkelanjutan, maka budaya kedermawanan dapat terus menjadi kekuatan kolektif dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.



Franciscus Welirang

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Budaya filantropi di Indonesia tumbuh dari perpaduan nilai-nilai agama, tradisi lokal, dan sejarah panjang solidaritas sosial. Gotong-royong dan semangat keagamaan menjadi modal sosial yang berharga dan perlu dimaknai kembali di tengah tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali dinamika tersebut serta menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap praktik filantropi.

Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah lahirnya Piagam Budaya Filantropi Indonesia, yang memuat kerangka nilai dan prinsip guna memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mendorong praktik filantropi yang transparan, akuntabel, dan berdampak. Piagam ini menjadi upaya konkret merekonstruksi ekosistem filantropi yang berakar pada budaya lokal. Kami berterima kasih kepada Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) serta para peserta FGD dari berbagai latar belakang atas kontribusi mereka. Semoga hasil ini menjadi panduan strategis dalam memperkuat budaya filantropi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.



Amelia Fauzia

Co-Lead Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam tujuh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam *World Giving Index*, menegaskan tingginya semangat kedermawanan masyarakat. Capaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kekuatan budaya gotong royong, saling membantu, dan solidaritas sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, budaya memberi di Indonesia terus berkembang melalui kolaborasi lintas sektor dan ko-kreasi antar pemangku kepentingan.

Sebagai asosiasi yang mewadahi berbagai lembaga filantropi nasional, Perhimpunan Filantropi Indonesia menyusun Piagam Budaya Filantropi Indonesia ini sebagai tonggak penting untuk menegaskan kembali bahwa budaya memberi di Indonesia bukanlah warisan statis, tetapi sebuah kekuatan kolektif yang terus tumbuh dan menyatu dengan dinamika zaman. Semoga dokumen ini dapat memperkuat kesadaran bersama bahwa membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan hanya mungkin dicapai dengan menjadikan nilai-nilai kedermawanan sebagai fondasi utama.



Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia



Ringkasan Eksekutif

Tulisan ini menunjukkan bahwa tingginya budaya filantropi di Indonesia terbentuk melalui keterhubungan antara domain tradisional dan institusional yang saling berkelindan dan saling menguatkan.

Kekuatan utama terletak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam aktivitas kedermawanan, yang menjadikan Indonesia termasuk dalam jajaran negara paling dermawan di dunia. Budaya filantropi ini merupakan hasil interaksi dinamis berabad-abad antara nilai-nilai agama, adat istiadat lokal, pengalaman sejarah, serta faktor sosial dan psikologis yang membentuk empati dan kepedulian sosial. Tradisi gotong-royong, istiadat lokal, dan berbagai praktik solidaritas sosial telah menjadi modal sosial yang memperkuat kohesi masyarakat Indonesia sejak era pra-kolonial hingga kini.

Ajaran agama memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku dan mendorong masyarakat menunaikan kedermawanan. Seiring perkembangan zaman, praktik filantropi di Indonesia mengalami transformasi: dari bentuk tradisional berbasis komunitas menuju bentuk-bentuk kontemporer yang lebih terstruktur, terinstitusionalisasi, dan memanfaatkan teknologi digital.

Tidak semua budaya filantropi yang ada, mendorong bagi penciptaan ekosistem filantropi yang berkelanjutan. Berbagai tantangan seperti kerumitan regulasi dan penyaluran dana yang didominasi bantuan konsumtif menjadi bagian dari budaya yang ada, yang melemahkan kontribusi filantropi terhadap agenda strategis

seperti pemberdayaan, penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan.

Tulisan ini melihat bahwa upaya penguatan budaya filantropi bisa dilakukan dengan penguatan ekosistem filantropi yang bersifat hibrida. Ekosistem hibrida menggabungkan kekuatan tradisi lokal dan nilai agama dengan inovasi, teknologi, dan praktik filantropi modern. Model ini memungkinkan kolaborasi lintas sektor dari individu, komunitas, organisasi keagamaan, korporasi, hingga platform digital untuk memperluas dampak, meningkatkan transparansi, dan mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif baru yang adaptif. Penguatan budaya filantropi akan memastikan bahwa ekosistem yang dibangun tidak hanya bersifat formal dan kelembagaan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritual masyarakat.

Tulisan ini mengusulkan sebuah kerangka nilai dan prinsip yang dapat menjadi pedoman lintas sektor yang disebut Piagam Budaya Filantropi Indonesia. Piagam Budaya ini diharapkan memperkuat kohesi kekuatan unsur tradisional dan institusional sehingga meneguhkan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk praktik filantropi yang berkelanjutan dan berdampak. Dengan menjadikan budaya filantropi sebagai fondasi dan membangun ekosistem hibrida, Indonesia berpeluang besar untuk mengoptimalkan potensi kedermawanan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Isi

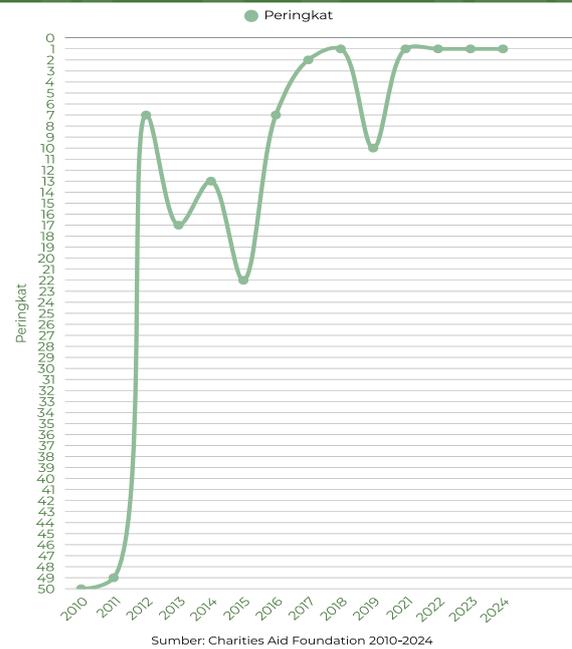
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Formasi Budaya Filantropi Indonesia	4
Budaya Filantropi di Indonesia: Sejarah dan Elemen Pembentuknya	5
Domain Tradisional dan Institusional dalam Budaya Filantropi	7
Ekosistem Filantropi: Kerangka Konseptual dan Dinamika Terkini di Indonesia	9
Melampaui Budaya: Langkah Strategis untuk Memperkuat Ekosistem Filantropi	
Berkelanjutan	14
Penutup	16
Piagam Budaya Filantropi	17
Narasumber	18
Bibliografi	20

Pendahuluan

Apa yang mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi begitu dermawan? Benarkah Indonesia memiliki budaya filantropi yang tinggi? Sejauh mana praktik filantropi yang kuat ini telah dioptimalkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan untuk dijawab seiring dengan penobatan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia selama tujuh tahun berturut-turut oleh Charities Aid Foundation (2024). Pengakuan ini ditegaskan oleh CAF walaupun Indonesia tidak menempati peringkat pertama pada 2017 dan 2019 karena penggunaan agregat 10 tahun terakhir pada perhitungan CAF (lihat Gambar 1). Survei World Giving Report (2025) menempatkan masyarakat Indonesia sebagai tertinggi (98%) secara global dalam membantu teman dan keluarga. Secara umum, 98% masyarakat Indonesia pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau tenaga (PIRAC, 2002). Secara khusus, 90% penduduk Indonesia tercatat memberikan donasi dalam bentuk uang (Charities Aid Foundation, 2024). Sementara itu, penelitian Pew Research Center (2012) menunjukkan bahwa 98% Muslim Indonesia menunaikan zakat. Temuan serupa diperoleh dari studi UIN Syarif Hidayatullah (2006), yang mencatat bahwa 99% Muslim Indonesia terlibat dalam kegiatan kedermawanan dan 98% di antaranya membayar zakat fitrah.

Capaian-capaian tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang faktor yang melandasi praktik filantropi yang tinggi ini. Budaya filantropi seperti gotong-royong sering dianggap sebagai pendorong utama tingginya praktik berderma di Indonesia (Chhina dkk., 2014). Namun, belum ada riset mendalam mengenai bagaimana budaya filantropi tumbuh, berkembang dan mempengaruhi kegiatan kedermawanan di Indonesia.

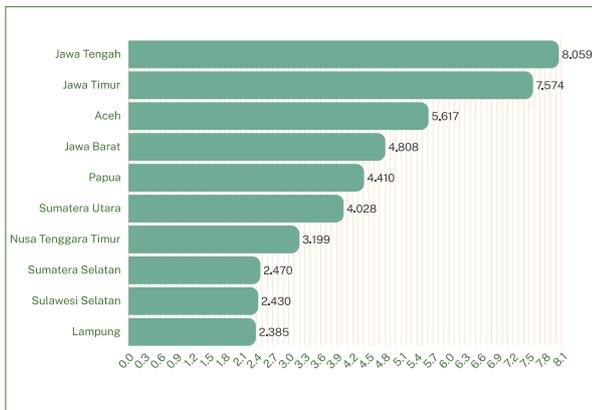


Gambar 1. Peringkat Kedermawanan Negara Indonesia.
Sumber: Laporan World Giving Index 2010-2024

Secara konseptual, budaya dapat dipahami sebagai himpunan nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan lintas generasi. Sedangkan konsep filantropi dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Payton (2008), yakni tindakan sukarela demi kepentingan publik yang muncul di berbagai masyarakat. Berdasarkan landasan konseptual ini, budaya filantropi yang berkembang di Indonesia tidak terbentuk secara spontan. Budaya Filantropi lahir dari interaksi dinamis antara nilai-nilai agama, adat istiadat lokal, pengalaman sejarah, serta faktor sosial dan psikologis yang membentuk rasa empati dan kepedulian sosial (Fauzia, 2013; Latief, 2013; Bowen, 1986).

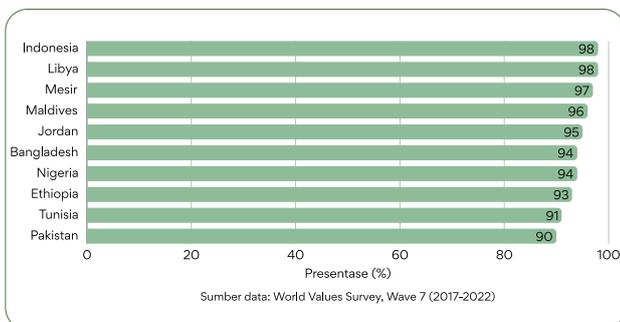
Sejarah telah menunjukkan bahwa praktik kedermawanan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi sosial. Sebagian besar praktik ini dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan ajaran agama. Dalam konteks tradisi, praktik seperti *Udunan* di Jawa Barat atau *Badoncek* di Sumatera Barat merupakan bentuk filantropi lokal berbasis komunitas. Praktik gotong-royong ini tetap hidup di tengah arus

modernisasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di bawah.



Gambar 2. 10 Provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kebiasaan Gotong Royong terbanyak.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Di sisi lain, berbagai agama yang dianut di Indonesia mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Laporan *World Values Survey* (2022) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia. Islam menekankan zakat, infak, sedekah, dan wakaf; Hindu mengenal dana punia; Kristen mengajarkan persepuluhan dan persembahan kasih; Katolik mengenal konsep derma; sedangkan ajaran Konghucu menekankan nilai ren, li, dan xiao sebagai landasan tindakan sosial. Fakta ini menjelaskan bagaimana ajaran agama memainkan peran signifikan dalam membentuk budaya filantropi dan mendorong praktik kedermawanan yang konsisten dan meluas di Indonesia. Tingginya tingkat keagamaan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah.

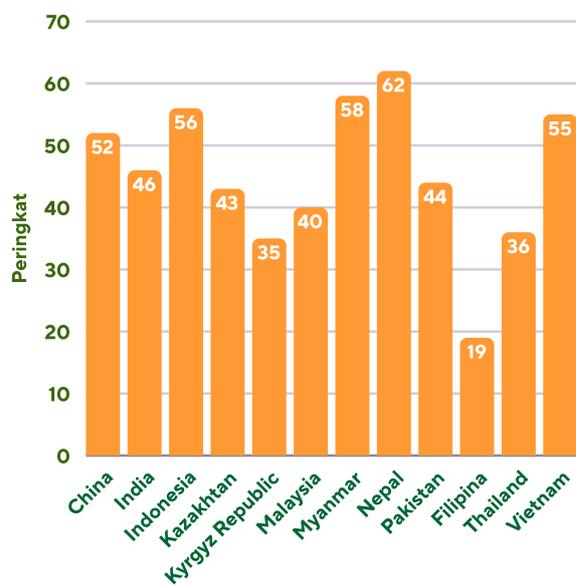


Gambar 3. Sepuluh negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia.
Sumber: World Values Survey, Wave 7 (2017-2022)

Seiring waktu, praktik filantropi di Indonesia mengalami transformasi. Selain bentuk tradisional yang masih dominan, muncul pula bentuk-bentuk filantropi kontemporer yang lebih terstruktur dan terinstitusionalisasi.

Proses modernisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi turut mendorong pertumbuhan lembaga filantropi yang semakin beragam: mulai dari yayasan keluarga, organisasi keagamaan, korporasi, komunitas, hingga individu. Transformasi ini mendorong keragaman serta praktik filantropi yang dinamis mengikuti perkembangan zaman.

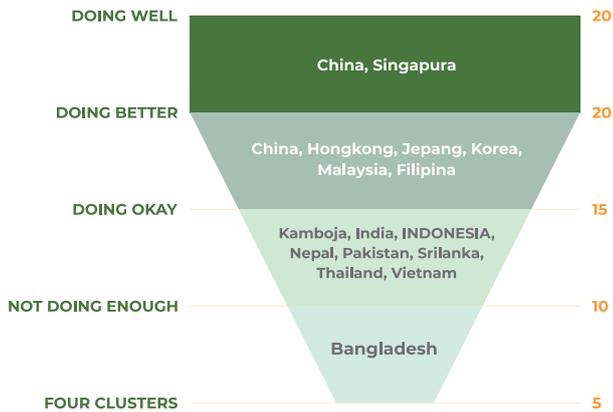
Di tengah perkembangan praktik filantropi di Indonesia, terdapat paradoks antara tingginya partisipasi dalam kegiatan derma dengan lemahnya ekosistem pendukung filantropi. Meski aktivitas filantropi masyarakat tinggi, sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa ekosistem filantropi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. *Index of Philanthropic Freedom* (Hudson Institute, 2015) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-56 dari 64 negara, jauh dibawah Malaysia yang berada di posisi ke-40.



Gambar 4. Peringkat Indeks kebebasan filantropi (negara di Asia) 2015.
Sumber: The Index Philanthropic Freedom (2015)

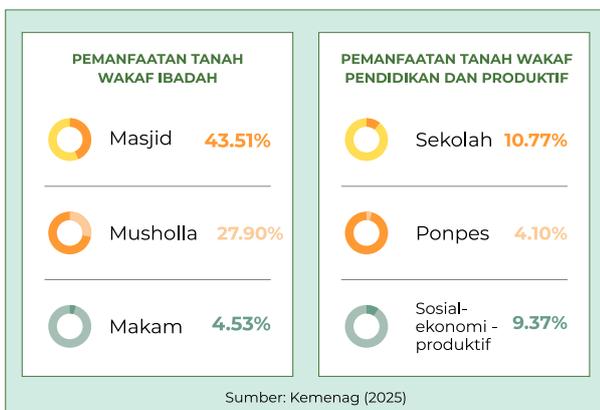
Penyebabnya antara lain adalah kurangnya insentif fiskal, regulasi yang rumit bagi lembaga filantropi, serta lingkungan kebijakan yang belum

mendukung secara optimal. Laporan *Doing Good Index* (Center for Asian Philanthropy and Society, 2022; 2024) menempatkan Indonesia dalam kategori "doing okay", satu tingkat dibawah "doing better" dan dua tingkat di bawah "doing well" yang menunjukkan belum optimalnya dukungan terhadap filantropi di Indonesia.



Gambar 5. Kluster kinerja filantropi negara-negara Asia menurut Center for Asian Philanthropy and Society (CAPS), dengan Indonesia berada pada kategori Doing Okay.
Sumber: Center for Asian Philanthropy and Society (2024)

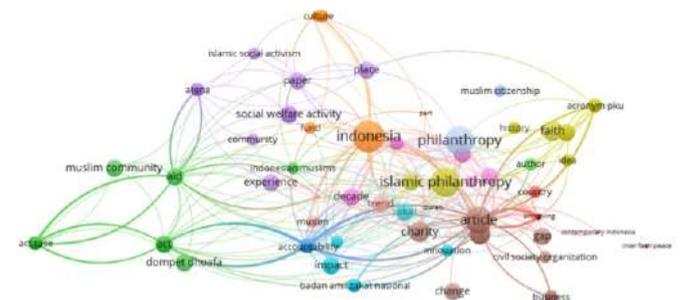
Selain hambatan regulatif dan kelembagaan, praktik filantropi di Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya berpihak pada agenda keadilan sosial dan keberlanjutan. Meski dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan, penyaluran dana filantropi masih lebih banyak diarahkan pada bantuan konsumtif atau karitatif, dibandingkan untuk isu-isu strategis seperti pemberdayaan masyarakat, penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi



Gambar 6. Grafik Pemanfaatan tanah wakaf.
Sumber: Kementerian Agama (Kemenag) (2025)

manusia, atau pelestarian lingkungan (Fauzia dkk., 2022). Hal ini terefleksikan misalnya pada pemanfaatan zakat dan wakaf yang lebih terfokus pada kegiatan konsumsi dan non-produktif. Sebagaimana terlihat pada Gambar 6 di atas, tanah wakaf lebih banyak dimanfaatkan sebagai masjid dan makam dibandingkan dengan pemanfaatan yang lebih produktif.

Gambar di bawah menunjukkan pemetaan literatur mengenai filantropi di Indonesia. Dari gambar tersebut, Berbagai isu filantropi di Indonesia telah banyak dibahas oleh berbagai studi. dapat disimpulkan bahwa literatur tentang filantropi di Indonesia telah mencakup berbagai topik, terutama yang berkaitan dengan filantropi Islam. Meskipun budaya filantropi telah dibahas dalam beberapa studi, topik ini masih relatif kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kekosongan tersebut menjadi celah yang diisi oleh penelitian ini.



Gambar 7. Mapping Literature Filantropi Indonesia dengan Keywords: philanthropy, charity, giving, Indonesia dari 1,000 literatur di Google Scholar.

Sebagai luaran utama, penelitian ini menghasilkan Piagam Budaya Filantropi Indonesia, sebuah kerangka nilai dan prinsip yang dapat menjadi pedoman bagi para pelaku filantropi di berbagai sektor. Piagam ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengarah pada praktik filantropi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdampak luas. Sebelum merumuskan budaya filantropi di Indonesia, perkembangannya serta permasalahan-permasalahan dalam ekosistem filantropi akan kami sajikan dalam pembahasan di bawah ini.

Formasi Budaya Filantropi Indonesia

Budaya filantropi di Indonesia memiliki akar historis dan kultural yang kuat, tercermin dalam praktik gotong-royong, sebuah konsep kerja sama dan solidaritas sosial yang telah lama tertanam dalam masyarakat.

Di samping akar budaya, filantropi Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam. Latief (2016) berargumen bahwa budaya memberi telah mengakar kuat dalam komunitas Muslim, sebagaimana diperintahkan oleh banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendorong umat Islam untuk membantu kaum miskin dan membutuhkan. Osili dan Ökten (2015) menegaskan bahwa praktik "memberi" di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam. Beberapa studi menunjukkan bahwa tindakan memberi sering kali didorong oleh ketakwaan dan kepatuhan religius (Abubakar & Chaider, 2006; Latief, 2013; Osili & Ökten, 2015; Hartnell, 2020; Sitorus & Abidin, 2022; Aziz et al., 2024; Nofitariani et al., 2024; Kurniati et al., 2022), dan tingkat religiusitas yang tinggi berkorelasi langsung dengan perilaku dermawan (Usman et al., 2020).

Dalam perkembangannya, Fauzia (2013) menunjukkan bahwa narasi gotong-royong dan keagamaan bukan hanya tradisi lama, tetapi juga telah dihidupkan kembali dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan pembangunan negara bangsa pasca kemerdekaan. Dalam konteks yang lebih kontemporer, Hartnell (2020) menunjukkan bahwa praktik kerelawanan tetap kuat di Indonesia hingga sekarang, di sini praktik tolong-menolong memungkinkan kontribusi finansial maupun non-finansial dari masyarakat. Hal ini tercermin melalui perkembangan teknologi bahwa platform seperti Kitabisa menonjolkan narasi gotong-royong serta keagamaan sebagai

wujud solidaritas nasional dalam membantu sesama (Anoraga, 2024; Bowen, 1986).

Walaupun negara-negara lain juga memiliki tradisi filantropi seperti gotong-royong dan keagamaan (Sciortino, 2017), namun, tetap terdapat variasi bentuk, aktor, dan intensitas praktik filantropi antarnegara. Hal ini dikarenakan praktik filantropi dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama serta oleh struktur politik dan sosial-ekonomi yang melingkupinya. Wolpert (1995) dan Soskis (2018) menyatakan bahwa kondisi pemerintahan, peran aktor non-pemerintah, serta tingkat permasalahan sosial-ekonomi sangat menentukan perkembangan praktik filantropi di suatu negara. Dalam konteks negara yang berperan aktif sebagai *welfare state*, dalam hal ini negara menyediakan kebutuhan dasar warganya, praktik filantropi cenderung mengalami penurunan. Namun, ketika negara mulai menarik diri dari tanggung jawab kesejahteraan sosial atau menghadapi keterbatasan dalam menjalankannya, aktivitas filantropi justru meningkat sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kekosongan peran negara (Odendahl, 1989).

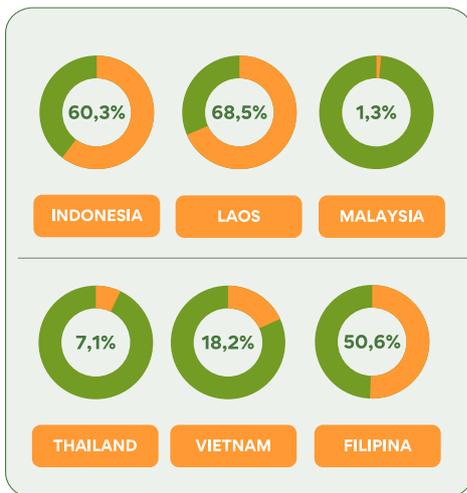
Dalam kondisi seperti ini, aktor non-pemerintah berperan penting. Lew dan Wojcik (2009) menjelaskan bahwa mereka dapat menekan pemerintah untuk kembali menjalankan tanggung jawab sosialnya, atau mengambil inisiatif sendiri melalui berbagai bentuk kegiatan filantropi. Praktik filantropi berperan sebagai saluran solidaritas sosial sekaligus menjadi bagian integral dalam proses pembentukan *civil society*. Fauzia (2013) berargumen bahwa filantropi memiliki kekuatan sosial-budaya dalam memperkuat masyarakat sipil, bahkan dapat dijadikan indikator keberadaan dan kekuatan masyarakat sipil di suatu negara.



Budaya Filantropi di Indonesia: Sejarah dan Elemen Pembentuknya

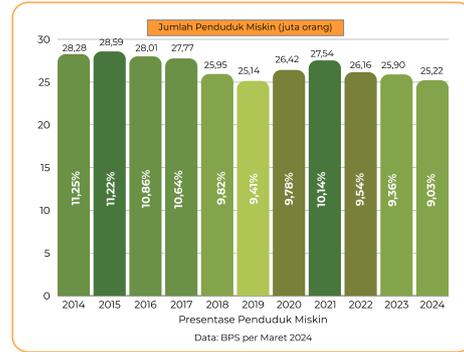
Budaya filantropi di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terbentuk melalui proses historis yang panjang dan kompleks. Budaya ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai komunal yang terbentuk melalui dinamika sosio-ekonomi dan politik sepanjang sejarah bangsa. Dinamika ini terbentuk dari:

1. Hubungan masyarakat dan pemerintah - secara umum, jika pemerintah lemah, maka *civil society* akan kuat.
2. Kompleksitas permasalahan sosio-ekonomi di Indonesia.



Gambar 8. Penduduk miskin negara ASEAN menurut World Bank.
Sumber: World Bank (2025).

Keterbatasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi di Indonesia telah mendorong peran serta masyarakat atau *civil society* yang sudah tumbuh subur jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Meskipun bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk pemerintahan sejak zaman kerajaan, kolonial, kemerdekaan hingga reformasi, masyarakat tetap aktif berperan menawarkan solusi untuk berbagai masalah terutama melalui kegiatan filantropi (Fauzia, 2013; Ingleson, 2015; Hoon, 2010).

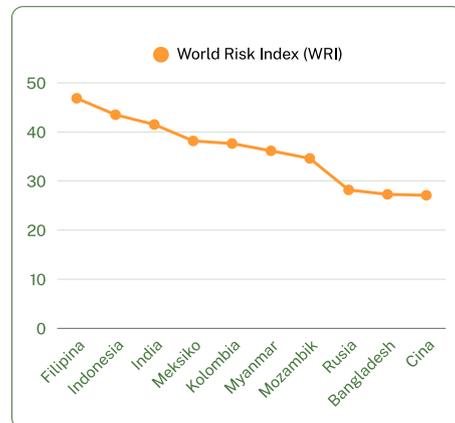


Gambar 9. Persentase tingkat kemiskinan Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Maret (2024)

Suburnya filantropi di Indonesia juga didorong oleh keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosio-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta bencana alam yang kerap melanda Indonesia (Sakai, 2012). Budaya filantropi ini menjadi semacam "pengganti" peran negara dalam membiayai layanan sosial (Raddon, 2023). Tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dalam satu dekade terakhir secara umum mengalami stagnasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Bahkan, berdasarkan data dari *World Bank* (2025), 60% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan resiko bencana alam paling tinggi menurut *World Risk Index* (2023). Secara geografis, Indonesia terletak di jalur *Ring of Fire* sehingga bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami sering terjadi, ditambah bencana alam lain seperti banjir,



Gambar 10. Negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia.
Sumber: World Risk Report (2023)

kebakaran hutan, dll. Menghadapi berbagai permasalahan sosio-ekonomi seperti ini, pemerintah mengalami keterbatasan yang diisi oleh berbagai inisiatif di masyarakat.

Kemandirian masyarakat Nusantara sudah terlihat sejak era pra-kolonial atau era kerajaan. Di era pra-kolonial, masyarakat Nusantara memiliki struktur politik yang unik, dengan kota-kota dagang dan kerajaan agraris tidak berada di bawah monopoli satu kekuatan besar (Hefner, 2000). Dengan kebebasan ini, masyarakat nusantara mempraktikkan agama mereka dengan cara yang beragam, yang kemudian memperkaya tradisi gotong-royong dan kepedulian sosial berdasarkan nilai-nilai agama dan adat. Selama era kolonial, sebagian masyarakat nusantara berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda yang membatasi partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Namun, keterbatasan ini mendorong mereka untuk fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan di luar pengawasan negara. Pesantren berkembang luas di bawah pimpinan ulama yang skeptis terhadap pemerintah kolonial menunjukkan kemandirian *civil society* (Abdullah, 1986; Azra, 2006).

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, konsep gotong-royong menjadi dasar ideologis negara Indonesia, menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa (Bowen, 1986). Para pendiri bangsa seperti Hatta dan Soekarno menekankan pentingnya gotong-royong dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Bung Hatta melihat gotong-royong sebagai bagian dari paham kerakyatan yang menekankan kemandirian ekonomi. Sementara Sukarno memposisikan gotong-royong sebagai intisari Pancasila, menekankan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, sejatinya Indonesia divisikan sebagai 'negara filantropi' di mana seluruh elemen masyarakat dan negara saling tolong-menolong untuk kemajuan bangsa.

Pada era Orde Baru, pemerintah memprioritaskan stabilisasi politik dan ekonomi dengan membatasi peran masyarakat di politik. Sebagai respons,

masyarakat fokus pada kegiatan sosial untuk menciptakan masyarakat sipil yang kuat untuk mengimbangi negara (Hefner, 2000). Terlebih, walaupun kelas menengah tumbuh pesat di era Orde Baru, hal ini juga diikuti dengan ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.

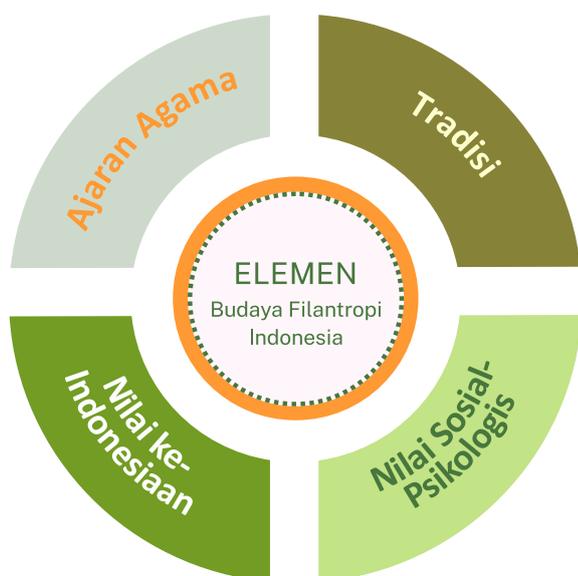
Di saat yang bersamaan, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Indonesia mengalami kebangkitan Islam yang luar biasa, ditandai dengan munculnya organisasi filantropi Muslim modern (Fauzia, 2013; Latief, 2016; Latief, 2023). Organisasi filantropi keagamaan tumbuh di tengah tingginya praktek keagamaan di Indonesia sehingga kini Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling religius di dunia (World Values Survey, 2022) sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3 di atas.. Peran *civil society* khususnya dalam filantropi semakin subur sejak era Reformasi, yaitu organisasi non-pemerintah semakin tumbuh dan beragam di tengah arus demokratisasi di Indonesia (Antlöv et al, 2010).

Kilas sejarah ini menunjukkan peran *civil society* di Indonesia sangat signifikan dalam membentuk budaya filantropi yang mengakar di masyarakat Indonesia. Persoalan mengenai ketimpangan kekayaan, tanggung jawab sipil, dan peran agama memengaruhi terbentuknya budaya filantropi (Odendahl, 1989). Nilai-nilai inti dari norma sosial dan budaya juga membentuk pola pemberian dan kesukarelawanan masyarakat (Eckstein, 2001; Kimmelmeier et al., 2006). Jadi, budaya filantropi terbentuk melalui faktor mikro (agama, ras dan etnis, hingga usia), faktor meso (berupa hubungan dan jejaring sosial) dan makro (konteks sosial yang lebih luas seperti ekonomi dan politik suatu negara) (Barman, 2017). Kita dapat melihat elemen-elemen penting yang membentuk budaya filantropi Indonesia diantaranya:

1. Ajaran Agama seperti zakat di Islam, persepuluhan di Kristen, dana punia di Hindu;
2. Tradisi seperti *Udunan* di Jawa Barat, dan *Pela Gandong* di Maluku;

3. Nilai-nilai ke-Indonesia-an seperti gotong-royong dan Pancasila;
4. Elemen sosial psikologis meliputi empati, rasa kemanusiaan, dan welas asih yang muncul saat melihat penderitaan orang lain. Sejarah bangsa telah mencatat berbagai penderitaan masyarakat Indonesia di antaranya kesulitan di zaman penjajahan dan bencana alam seperti tsunami Aceh pada tahun 2004, dll.

Secara umum, elemen-elemen budaya ini sering terefleksi melalui narasi-narasi gotong-royong dan keagamaan. Nilai-nilai ini menjadi api abadi yang membuat praktik filantropi selalu menyala sepanjang sejarah bangsa Indonesia.



Gambar 11. Elemen pembentuk budaya filantropi Indonesia.
Sumber: Tim peneliti (2025).

Domain Tradisional dan Institusional dalam Budaya Filantropi

Dalam perkembangannya, budaya filantropi di Indonesia menunjukkan keragaman dimensi yang merefleksikan dinamika masyarakat. Keragaman ini melibatkan berbagai aktor, di mana praktik filantropi tidak hanya dilakukan oleh komunitas atau organisasi non-pemerintah (NGO), tetapi juga oleh institusi pemerintah dan perusahaan, yang kemudian melahirkan istilah filantropisasi

(Fauzia, 2017). Motivasi dibalik keterlibatan aktor-aktor ini bervariasi, mulai dari motivasi altruistik atau welas asih hingga motivasi yang lebih pragmatis atau ideologis. Selain itu, praktik filantropi di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada filantropi tradisional, tetapi juga telah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai perubahan yang lebih signifikan, seperti keadilan sosial.

Dalam hal ini, para ahli sering membedakan antara filantropi tradisional dengan filantropi institusional.

a. Filantropi Tradisional

Filantropi tradisional di Indonesia sering kali berbentuk aksi spontan dan bersifat komunal. Praktik ini cenderung impulsif, didorong oleh rasa empati atau welas asih terhadap sesama, dilakukan seperti kebiasaan, kadang tanpa perencanaan strategis jangka panjang. Filantropi tradisional berkembang berdasarkan nilai, norma, dan kebutuhan spesifik suatu wilayah atau komunitas (Wolpert, 1995; Soskis, 2018; Wiepking, 2021). Kegiatan ini memiliki kekuatan dalam membangun solidaritas sosial dan menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat, terutama dalam situasi krisis atau darurat (Shapiro dkk., 2018; Jang, 2018). Bahkan World Giving Report (2025) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang memiliki solidaritas dalam menolong teman dan keluarga (98%). Namun demikian, karena sifatnya yang tidak terstruktur dan terbatas pada lingkup kedekatan sosial (*bonding*), filantropi tradisional seringkali tidak mampu menjawab akar persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perannya lebih banyak menysar pada pemenuhan kebutuhan langsung jangka pendek. Contohnya pemberian donasi ke pengemis di pinggir jalan dapat diklasifikasikan filantropi yang bersifat tradisional.

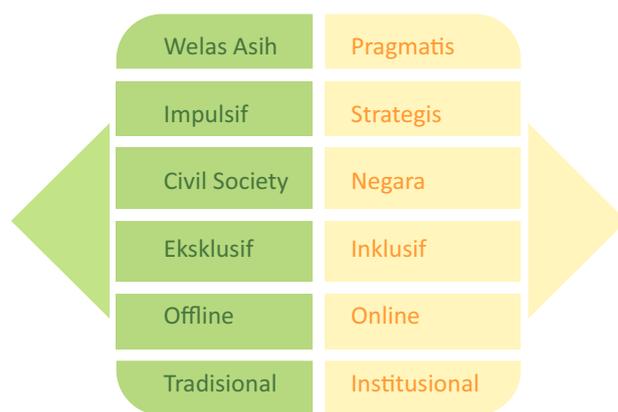
b. Filantropi Institusional

Filantropi institusional berkembang sebagai pendekatan strategis dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Praktik ini dijalankan oleh lembaga formal seperti *non-governmental organization*

(NGO), yayasan, organisasi keagamaan, perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), hingga institusi negara (Achda, 2006; Van der Eng, 2023). Ciri khas dari filantropi institusional adalah adanya perencanaan program, pengelolaan dana profesional, evaluasi dampak, serta pendekatan yang inklusif dan berbasis data. Motivasi dalam filantropi institusional pun beragam, tidak hanya altruistik tetapi juga pragmatis dan ideologis misalnya demi reputasi, insentif politik, atau keberlanjutan bisnis. Meski demikian, filantropi jenis ini membuka ruang lebih besar untuk menjangkau kelompok marginal, mendorong perubahan struktural, dan mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas. Pemberian dalam bentuk aset yang digunakan untuk hal-hal produktif serta dikelola oleh manajemen profesional untuk kemaslahatan bersama dapat digolongkan sebagai contoh filantropi institusional.

Selain filantropi tradisional dan institusional, terdapat ragam dimensi filantropi lain di Indonesia yang dapat dilihat dalam beberapa aspek:

1. *Welas asih* dan *pragmatis*: Filantropi dapat memiliki motivasi *welas asih* dan *pragmatis*. Di sini, motivasi altruistik berfokus pada kebaikan tanpa pamrih, sementara motivasi pragmatis mencakup manfaat material dan immaterial seperti prestise atau pahala.
2. *Impulsif* dan *strategis*: Filantropi dapat bersifat *impulsif*, didorong oleh perasaan kasihan terhadap penerima manfaat, atau *strategis* dengan fokus pada dampak yang dihasilkan.
3. *Civil society* dan *negara*: Filantropi dapat dilakukan oleh *civil society* maupun negara.
4. *Eksklusif* dan *inklusif*: Filantropi dapat didasari oleh perasaan solidaritas terhadap orang yang dibantu, seperti kesamaan agama atau suku, dan bersifat *inklusif* dalam hal pemberian dilakukan tanpa



Gambar 12. Ragam Dimensi Filantropi.
Sumber: Tim Peneliti (2025)

memandang latar belakang penerima manfaat.

5. *Online* dan *offline*: Filantropi dapat dilakukan melalui media baru seperti *online crowdfunding* maupun *offline* seperti pemberian langsung.
6. *Tradisional* dan *institusional*: Filantropi dapat dilakukan secara komunal dan informal, atau dikelola secara institusional oleh lembaga formal seperti NGO atau organisasi masyarakat.

Meskipun ragam dimensi ini sering dipertentangkan, pada kenyataannya mereka saling melengkapi dalam upaya mengatasi kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi. Di tengah arus modernisasi, praktik filantropi tradisional berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang vital. Di sisi lain, filantropi institusional memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Seraya mempertahankan keragaman filantropi ini, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara filantropi tradisional, yang cenderung bersifat impulsif, dan filantropi institusional, yang ternyata berbagai data menunjukkan bahwa filantropi tradisional masih mendominasi. Misalnya dalam hal zakat fitrah yang wajib ditunaikan saat Ramadhan, sebagian besar Muslim di Indonesia (70,3%) membayarkannya melalui masjid dan pesantren di sekitar mereka

(tidak melalui organisasi filantropi Islam) (IDEAS, 2025). Di satu sisi, fenomena ini memperlihatkan besarnya potensi filantropi di Indonesia. Namun, disisi lain, harapan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui filantropi masih sulit dicapai.

Filantropi institusional secara umum berperan dalam mempromosikan filantropi yang inklusif dan berkelanjutan (Fauzia et al, 2022). Melalui filantropi institusional, filantropi tidak hanya terbatas pada

aspek komunal (*bonding*), namun, filantropi juga menjadi media komunikasi yang dapat menjembatani (*bridging*) berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Selain itu, filantropi institusional juga berperan dalam menjalankan program-program pemberdayaan sehingga memiliki dampak yang berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan filantropi institusional, diperlukan adanya ekosistem filantropi yang mendukung.

Ekosistem Filantropi: Kerangka Konseptual dan Dinamika Terkini di Indonesia

Kerangka Konseptual Ekosistem Filantropi

Ekosistem filantropi dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dan saling terhubung, terdiri atas berbagai elemen seperti sumber pendanaan, aktor pelaksana, mekanisme tata kelola, serta kelompok penerima manfaat (Bird & Aninant, 2023; Center for Asian Philanthropy and Society, 2024). Selain elemen-elemen struktural ini, ekosistem filantropi juga beroperasi dalam kerangka nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kebijakan publik yang membentuk perilaku serta orientasi para pelaku filantropi. Sayangnya, dimensi budaya kerap terpinggirkan dalam diskursus seputar penguatan ekosistem filantropi. Pembahasan sering kali berfokus pada aspek kelembagaan, regulasi fiskal, atau dinamika ekonomi-politik, sementara budaya, sebagai elemen “perangkat lunak” yang tidak kasat mata, kurang mendapat perhatian meskipun justru menjadi penggerak dasar dalam praktik memberi di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pentingnya peran budaya dalam menopang ekosistem filantropi sangat kentara. Beragam aktor, baik individu, korporasi, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan akademik, secara kolektif membentuk lanskap filantropi yang dinamis. Di antara mereka, kontribusi individu tetap menjadi tulang

punggung utama, dengan 82% organisasi sektor sosial menerima donasi dari individu dan yayasan amal, jauh melampaui kontribusi dari pemerintah (33%) dan perusahaan (49%) (Center for Asian Philanthropy and Society, 2024). Generasi muda seperti milenial dan Gen Z juga menunjukkan partisipasi aktif melalui kanal digital, sejalan dengan tingginya penetrasi media sosial yang mencapai sekitar 139 juta pengguna. Di sisi lain, korporasi menjalankan program CSR sebagai bagian dari strategi reputasi dan tanggung jawab sosial, dengan lebih dari 200 yayasan perusahaan aktif dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan. Organisasi masyarakat sipil dan keagamaan seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut memperkuat struktur filantropi hingga ke tingkat daerah.

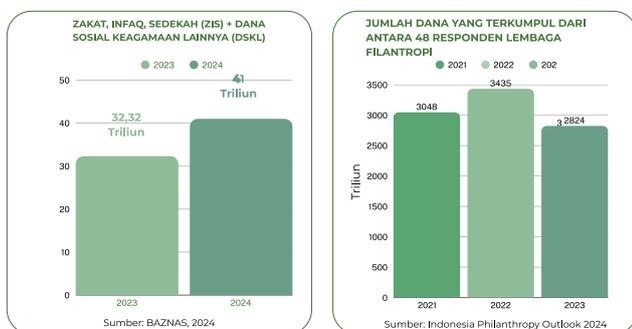
Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya mampu menutupi tantangan mendasar seperti lemahnya regulasi, tata kelola, dan kolaborasi antar-lembaga. *Global Philanthropy Environment Index (2022)* hanya memberi skor 3,43 dari 5 untuk Indonesia, menunjukkan perlunya penguatan sistemik. Di tengah kompleksitas ini, terdapat satu elemen yang justru menjadi kekuatan paling stabil dalam menopang keberlangsungan filantropi di Indonesia: **budaya**.

Budaya sebagai Pilar Kuat Ekosistem Filantropi saat ini

Jika tata kelola regulatif dan institusional masih tertatih, maka aspek budaya justru menunjukkan daya tahan dan konsistensi yang tinggi dalam menopang praktik filantropi nasional. Laporan *Global Philanthropy Environment Index (2022)* menegaskan bahwa dari seluruh elemen ekosistem filantropi, lingkungan sosial-budaya memperoleh skor tertinggi (skor 5/5). Artinya, kekuatan sejati filantropi Indonesia tidak (atau belum) bertumpu pada instrumen kelembagaan, melainkan pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Budaya gotong-royong, solidaritas komunitas, dan keagamaan berbagi menjadi modal sosial aktif yang terus dijalankan dalam keseharian warga. Bahkan ketika insentif pajak, regulasi negara, atau infrastruktur kelembagaan belum cukup mendukung, masyarakat tetap menunjukkan kapasitas filantropis-nya melalui inisiatif mandiri. Di sinilah budaya berfungsi sebagai pilar strategis.

Namun budaya tidak selalu bersifat netral. Dalam konteks filantropi inklusif dan berkelanjutan, budaya bisa berperan sebagai pendorong sekaligus penghambat. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah. Maka, pendekatan terhadap budaya filantropi haruslah kontekstual dan tidak disimplifikasi menjadi baik atau buruk secara mutlak.



Gambar 13. Perkembangan penghimpunan dana filantropi di Indonesia. Sumber: BAZNAS (2024); Indonesia Philanthropy Outlook (2024)

Melihat kompleksitas ini, budaya filantropi semestinya tidak diposisikan sebagai latar belakang pasif dari ekosistem, tetapi sebagai perangkat aktif yang membentuk desain sistem itu sendiri.

Tabel 1. Contoh nilai-nilai budaya filantropi Indonesia beserta faktor pendorong dan penghambatnya.

Contoh Budaya Filantropi	Pendorong	Penghambat
Gotong Royong	Mendorong partisipasi kolektif, memperkuat solidaritas sosial.	Kurang inklusif bila berbasis kekerabatan; rentan ketergantungan sosial.
Nilai Ikhlas	Mendorong pemberian tanpa pamrih.	Melemahkan akuntabilitas; membuat monitoring dianggap tabu.
Sikap Sungkan	Menekankan pentingnya kepercayaan.	Menghambat evaluasi, membuat pengawasan publik menjadi tidak efektif.
Sedekah bumi/ritual sosio-religius lain	Memperkuat identitas sosial budaya, mendorong pemerataan ekonomi.	Cenderung bersifat seremonial saja.

Membangun ekosistem filantropi yang adaptif di Indonesia menuntut integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan praktik kelembagaan modern. Ini bukan soal memilih salah satu, melainkan merajut keduanya agar dapat saling menguatkan: agar ikhlas berjalan seiring dengan akuntabilitas; agar gotong royong tidak saja bersifat spontan, tapi juga terstruktur dan strategis.

Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan dari Inti Budaya Filantropi

Nilai-nilai lokal dan kearifan komunitas masih berperan besar dalam kehidupan sosial di Indonesia. Dalam hal ini, membangun ekosistem filantropi yang kokoh justru menuntut perhatian serius terhadap *inti budaya filantropi*. Budaya menjadi *sumber nilai, arah gerak, sekaligus daya lenting* yang menjaga ekosistem tetap relevan dan tangguh dalam menghadapi perubahan maupun krisis.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, budaya dimaknai sebagai kekuatan yang mampu memperteguh jati diri bangsa, mewujudkan masyarakat madani, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, partisipatif, kelokalan, dan keberlanjutan, yang semuanya sangat relevan sebagai prinsip dasar ekosistem filantropi yang kontekstual dan berakar (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017).

Dengan menjadikan budaya filantropi sebagai pusat rancangan ekosistem, maka desain sistem

tidak dibentuk dari atas ke bawah, melainkan dari dalam ke luar. Sistem akan selaras dengan dinamika sosial masyarakat, dan bukan menjadi beban baru yang mengalienasi pelaku-pelaku filantropi di akar rumput.

Dalam ekosistem filantropi Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua domain budaya yang dominan: budaya filantropi tradisional dan institusional. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tradisional berakar pada nilai ikhlas, relasi sosial personal, serta gotong royong yang sangat kuat dalam membangun kepercayaan dan solidaritas. Namun dalam konteks institusional, nilai-nilai tersebut dapat menghadapi tantangan, misalnya terkait akuntabilitas dan tata kelola. Sebaliknya, budaya institusional yang menekankan efisiensi, dokumentasi, dan indikator keberhasilan kadang kehilangan kedalaman spiritual dan dimensi kasih sayang yang menjadi jiwa dari praktik memberi itu sendiri.

Menuju Ekosistem Filantropi yang Inklusif dan Transformatif

Jalan ke depan adalah dengan tidak menginstitusionalisasi tradisi secara kaku, atau menolak profesionalisasi secara total, tetapi dengan merancang ekosistem yang inklusif dan transformatif yang menyeimbangkan antara modernisasi kelembagaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kultural. Ini berarti membangun sistem yang mampu merespons krisis melalui bantuan langsung, sekaligus tidak mengabaikan upaya pemberdayaan dan kemandirian jangka panjang. Profesionalisme tidak boleh mematikan dimensi spiritual dan kasih sayang dalam memberi.

Pendekatan ini tidak menempatkan tradisi dan profesionalisme sebagai dua kutub yang saling

meniadakan, melainkan sebagai unsur yang dapat saling melengkapi. Praktik filantropi idealnya dibangun di atas jembatan antara keberlanjutan dan spiritualitas sosial. Oleh karena itu, tata kelola filantropi harus berakar pada konsensus sosial yang partisipatif dan tetap menghargai logika serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini, ekosistem yang tumbuh dari budaya akan lebih tahan terhadap guncangan karena memiliki akar sosial yang kuat. Ia tidak tergantung pada satu model lembaga, satu jenis donor, atau satu bentuk program. Ia adalah sistem hidup, fleksibel, dan tumbuh bersama masyarakat yang melahirkannya.

Di China misalnya, nilai altruisme dan harmoni sosial yang berakar dari Konfusianisme mendorong individu dan korporasi untuk terlibat dalam filantropi sebagai panggilan moral. Budaya ini membuat banyak perusahaan, terutama yang bukan milik negara, aktif dalam tanggung jawab sosial sebagai bagian dari etika bisnis. Hasilnya, ekosistem filantropi di China menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan karena didukung oleh fondasi budaya yang kuat.

Di Amerika, budaya memberi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, tradisi komunitas, dan sejarah demokrasi yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif untuk kebaikan bersama. Sejak masa kolonial, ajaran Puritan dan praktik Native American menanamkan konsep filantropi sebagai kewajiban moral dan bentuk partisipasi sosial, yang kemudian berkembang menjadi tradisi filantropi modern yang luas dan terorganisasi, termasuk peran besar yayasan dan donasi korporasi. Dengan demikian, budaya memberi ini membentuk ekosistem filantropi yang sangat besar, beragam, dan otonom, di mana filantropi dipandang sebagai bagian integral dari demokrasi di Amerika.

Contoh-contoh ini menekankan bahwa ekosistem filantropi yang berkelanjutan tidak bergantung pada sumber daya material saja, tetapi lebih dalam lagi pada nilai, makna, dan relasi yang menopangnya. Dalam praktik filantropi kontemporer, kita kerap menyaksikan penyusupan kepentingan politis, glorifikasi tokoh, hingga kampanye yang menjual kesedihan. Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan kembali fondasi budaya filantropi melalui empat elemen utama budaya filantropi Indonesia, dan bagaimana masing-masing dapat menopang keberlanjutan secara sistemik:

1. Ajaran Agama

Elemen ini menjadi fondasi awal dalam pembentukan ekosistem filantropi di Indonesia. Ajaran agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan

Konghucu menanamkan nilai dasar kemurahan hati dan kewajiban sosial melalui doktrin seperti zakat, sedekah, dana punia, dan tithes. Nilai-nilai ini menjadi penopang moral yang menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap praktik memberi, sekaligus membentuk struktur awal dari jejaring bantuan yang berkesinambungan.

Namun, transformasi nilai teologis dalam konteks modern menimbulkan tantangan. Sehingga terjadi pergeseran orientasi dari keikhlasan menuju kalkulasi pahala dan personal branding, apalagi dalam kampanye digital yang mengemas sedekah sebagai promosi spiritual. Di sinilah peran kritis elemen ini terhadap ekosistem: menjaga keseimbangan antara motivasi spiritual individu dan misi sosial, bukan hanya memperbesar nominal bantuan, tetapi memperkuat dampak dan keadilan sosial dalam jangka panjang. Di sini institusionalisasi agama semestinya tidak memonopoli makna kebaikan, melainkan memperluas partisipasi dalam gerakan kemanusiaan lintas iman.

2. Tradisi

Tradisi lokal seperti *mapalus* di Minahasa, *pengucapan syukur* di Sulawesi Utara, *selamatan* dan *jimpitan* di Jawa, atau *arisan* di banyak daerah membentuk jejaring sosial yang hidup dan otonom. Praktik-praktik ini menjadi bagian dari ekosistem berbagi yang terbentuk dari identitas kolektif dan relasi sosial jangka panjang. Di sinilah elemen budaya berfungsi bukan sebagai warisan pasif, tetapi sebagai infrastruktur sosial yang lentur, adaptif, dan berkelanjutan.

Namun, seperti disampaikan dalam diskusi kelompok terfokus (23 Januari 2025), keberlanjutan tidak bisa hanya bersandar pada solidaritas sesaat. Budaya berbagi perlu melampaui filantropi yang bersifat reaktif menuju praksis yang memperkuat

kapasitas sosial. Dalam diskusi yang sama, juga ditekankan bahwa pelibatan budaya lokal harus menghormati narasi komunitas, bukan sekadar dijadikan alat branding oleh pihak luar. Ketika nilai budaya diintegrasikan secara otentik dalam desain program, maka ekosistem filantropi akan memiliki akar sosial yang kuat dan daya hidup jangka panjang melalui rasa memiliki serta tanggung jawab kolektif.

3. Nilai Sosial-Psikologis

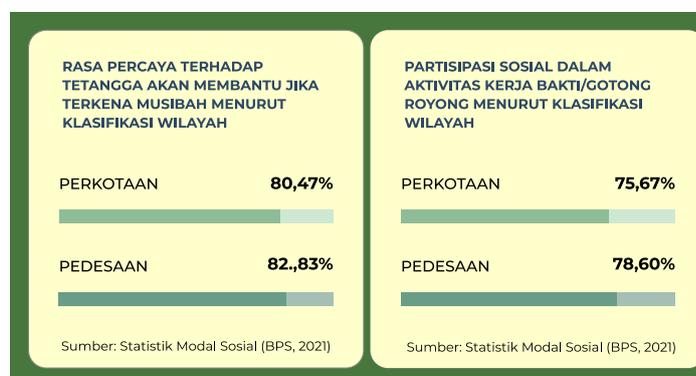
Nilai sosial-psikologis mencakup: nurani, empati, dan keterhubungan emosional antarindividu. Dalam banyak kasus, *volunteering* dan saling bantu terjadi bukan karena instruksi atau kewajiban, tetapi karena dorongan batin untuk hadir bersama yang lain dalam kesulitan. Inilah dasar dari ekosistem filantropi yang egaliter, yaitu ketika etika relasional menggantikan logika hierarki. Menurut salah satu narasumber kami, disampaikan pentingnya membangun relasi horizontal antara pemberi dan penerima, yang keduanya sama-sama belajar dan tumbuh. Hal ini sejalan dengan hasil diskusi kelompok terfokus (Januari 2025), yang menekankan bahwa semua pihak dalam praktik filantropi adalah pembelajar dan kontributor. Tidak ada yang dominan. Ekosistem menjadi wadah kolaboratif, bukan kompetitif, yang menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi lintas batas formal dan informal. Nilai sosial-psikologis ini menjadi benih dari filantropi berbasis komunitas dan kewargaan aktif—yang dalam jangka panjang menciptakan jaringan bantuan yang tidak tergantung pada institusi, melainkan pada jejaring afeksi, solidaritas, dan kapasitas relasional masyarakat itu sendiri.

4. Nilai Ke-Indonesiaan

Gotong royong bukan hanya slogan, tapi praktik nyata redistribusi sosial yang menjadi bagian dari identitas kolektif bangsa Indonesia. Nilai ini, yang melekat dalam kegiatan seperti kerja bakti, ronda malam, panen bersama, hingga pengumpulan dana darurat secara spontan, menjadi sumber daya sosial informal yang menopang masyarakat saat institusi formal belum hadir atau gagal berfungsi.

Namun, berdasarkan wawancara mendalam, dikemukakan bahwa jejaring sosial semacam ini belum sepenuhnya dijahit secara sistemik dalam arsitektur filantropi nasional. Dalam konteks ekosistem, gotong royong harus dibaca sebagai modal sosial yang dapat dikelola, diorganisasi, dan ditumbuhkan. Bukan untuk diseragamkan, tapi untuk dipahami sebagai kekuatan sosial yang dinamis dan kontekstual.

Nilai-nilai seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kesetaraan menjadi penopang normatif dari budaya filantropi yang reflektif dan inklusif (Kurniati dkk., 2022). Dalam konteks ini, nilai keindonesiaan menjadi identitas simbolik sekaligus menjadi instrumen etis yang menghubungkan solidaritas lokal dengan cita-cita keadilan sosial secara nasional.



Gambar 14. Tingkat kepercayaan sosial dan partisipasi gotong royong masyarakat menurut klasifikasi wilayah perkotaan dan pedesaan. Sumber: Statistik Modal Sosial BPS (2021)

Ekosistem filantropi Indonesia yang berkelanjutan menuntut integrasi dari keempat elemen: teologi, budaya, sosial-psikologis, dan keindonesiaan. Elemen teologis dan budaya memberikan kedalaman historis dan kontinuitas moral, sedangkan nilai sosial-psikologis dan keindonesiaan menyuplai daya hidup, inklusivitas, dan kapasitas adaptif.

Jika salah satu unsur mendominasi, maka ekosistem menjadi timpang: terlalu ritualistik, eksklusif, sentimental, atau nasionalistik semu. Namun, bila dikelola dalam keseimbangan, maka terbentuklah ekosistem filantropi yang reflektif, etis, dan transformatif yang bukan hanya sebagai aktivitas memberi, tetapi menyambung, merawat, dan membebaskan.

Melampaui Budaya: Langkah Strategis untuk Memperkuat Ekosistem Filantropi Berkelanjutan

Walaupun budaya memiliki peran penting sebagai fondasi pembentuk ekosistem filantropi, namun, budaya saja tidak cukup untuk menopang ekosistem filantropi. Diperlukan langkah-langkah strategis lebih lanjut untuk mewujudkan filantropi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah strategis ini membutuhkan pendekatan multidimensi yang mencakup pendidikan, regulasi, kolaborasi, akuntabilitas, dan digitalisasi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Pendidikan membentuk basis kesadaran kritis masyarakat tentang budaya filantropi serta pentingnya berbagi dan keadilan sosial. Regulasi menerjemahkan nilai-nilai dalam budaya filantropi menjadi hukum positif yang mengatur praktik filantropi. Dalam hal ini, akuntabilitas dan

transparansi menjadi mekanisme kontrol sosial yang menjaga integritas lembaga filantropi dan memperkuat legitimasi publik terhadap kinerjanya. Selain itu, kolaborasi harus dikembangkan bukan hanya sebagai upaya operasional, tetapi sebagai strategi pembangunan jaringan sosial yang memungkinkan distribusi peran secara lebih efisien dan merata. Penguasaan teknologi digital pun menjadi penting dalam kegiatan filantropi untuk mendukung kolaborasi, efisiensi, serta inovasi. Berdasarkan poin-poin ini, penguatan filantropi Indonesia harus diarahkan pada reformasi struktural yang menempatkan integrasi budaya, pendidikan, regulasi, akuntabilitas, kolaborasi dan teknologi sebagai fondasi untuk mendukung filantropi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Pendidikan

Ekosistem filantropi yang berkelanjutan perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai berbagi, sementara pendidikan formal dapat memperkuat pemahaman dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial. Penting untuk memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum sejak usia dini, seperti di TK atau SD. Hal ini sejalan dengan temuan Fairbairn (2024) yang menunjukkan bahwa pengalaman filantropi masa kecil berperan penting dalam membentuk perilaku prososial di masa depan, terutama bagi Generasi Alpha yang diprediksi akan menjadi

generasi paling terdidik dan makmur.

Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan publik dan sistem pendidikan secara menyeluruh. Penting untuk meningkatkan literasi dan edukasi sebagai katalisator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi. Tanpa dukungan pendidikan yang memadai, budaya berbagi berisiko tergerus oleh individualisme. Oleh karena itu, pendidikan baik informal maupun formal, harus menjadi fondasi utama dalam melestarikan budaya filantropi yang kuat dan berkelanjutan.



Regulasi

Meskipun budaya filantropi sudah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, terdapat tantangan besar dalam regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman dan dinamika praktik filantropi modern. Dalam wawancara mendalam, salah satu persoalan utama yang disorot adalah ketiadaan lembaga pengawas independen di sektor filantropi, terutama dalam praktik *crowdfunding* yang kian marak. Regulasi yang belum memadai membuka peluang bagi penyalahgunaan dana, sehingga berisiko merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Kondisi ini mencerminkan pentingnya membangun kerangka hukum yang lebih kuat, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ekosistem filantropi digital, guna memastikan akuntabilitas dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di sisi lain, dari ribuan lembaga zakat yang beroperasi di Indonesia, hanya sebagian kecil yang telah mengantongi sertifikasi resmi serta memiliki sistem pelaporan yang profesional. Ketimpangan ini diperparah oleh desentralisasi kelembagaan yang tidak diiringi dengan standar

tata kelola yang seragam. Akibatnya, muncul fragmentasi dalam sistem distribusi bantuan yang berdampak pada ketidakmerataan akses dan efektivitas program-program filantropi. Kondisi ini mempertegas pentingnya sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan profesionalisme dalam memperkuat ekosistem filantropi nasional. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah penyusunan *blueprint* nasional ekosistem filantropi yang mencakup pembaruan regulasi agar selaras dengan dinamika praktik di lapangan.

Tabel 2. Regulasi terkait kegiatan Filantropi di Indonesia

No	Peraturan
1	UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2	UU No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3	UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
4	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
5	UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
6	UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB)



Akuntabilitas dan Transparansi

Selain regulasi, akuntabilitas dan transparansi adalah fondasi penting dalam tata kelola filantropi yang sehat. Tanpa keduanya, kepercayaan publik dapat menurun, partisipasi masyarakat melemah, dan dampak sosial dari donasi menjadi tidak maksimal. Idealnya, lembaga filantropi menyampaikan laporan tahunan, membuka publikasi kegiatan, dan menjalani audit eksternal secara rutin. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga terutama yang berbasis komunitas atau keagamaan seperti masjid dan sekolah belum memiliki sistem pelaporan yang memadai. Sebagian besar dana filantropi masih dikelola oleh entitas non-formal dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas, meskipun justru

merekalah yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat.

Kultur "sekan" dari donatur untuk menuntut pertanggungjawaban dan minimnya pelibatan publik dalam pengawasan memperlemah ekosistem akuntabilitas. Kurangnya transparansi menciptakan ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan dana dan mengancam legitimasi sektor ini. Oleh karena itu, sektor ini perlu memperkuat keterbukaan, baik dalam hal keuangan maupun kebijakan, guna membangun kepercayaan dan keberlanjutan.



Kolaborasi

Keragaman lembaga filantropi di Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama dalam membentuk ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap lembaga membawa karakter, pendekatan, dan basis komunitas yang unik. Namun, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam membangun kolaborasi antar-lembaga. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (Januari-Februari 2025), teridentifikasi bahwa kurangnya keselarasan visi antar-lembaga sering kali menjadi penghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Fragmentasi dalam distribusi bantuan memperburuk kondisi ini, karena sebagian penerima memperoleh bantuan berulang dari berbagai pihak, sementara kelompok lain justru terlewatkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pemetaan

pemangku kepentingan yang lebih menyeluruh serta penguatan kapasitas organisasi agar kolaborasi dapat berjalan lebih strategis dan merata. Salah satu hambatan utama dalam membangun kolaborasi filantropi adalah masih kuatnya orientasi jangka pendek, terutama pada lembaga yang memaknai donasi sebagai bentuk amal sesaat. Meskipun pendekatan ini responsif terhadap kebutuhan darurat, ia cenderung menghambat terbentuknya sinergi untuk perubahan struktural yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam forum diskusi yang sama, ditekankan perlunya pergeseran paradigma dari filantropi berbasis *charity* menuju filantropi strategis yang berfokus pada dampak jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor kini menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat peran filantropi dalam pembangunan sosial.



Digitalisasi Filantropi

Digitalisasi telah mengubah lanskap filantropi di Indonesia dengan menghadirkan berbagai kanal baru seperti media sosial dan platform crowdfunding yang memudahkan pengumpulan dana serta pelibatan masyarakat. Generasi muda, seperti milenial dan Gen Z, cenderung memilih kanal digital karena kemudahan akses, sementara generasi tua lebih menyukai pola donasi langsung yang dianggap lebih personal. Kedua pendekatan ini sebaiknya tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi: donasi digital menawarkan kecepatan dan jangkauan, sementara donasi langsung mempertahankan kedekatan dan kepercayaan.

Namun, transformasi digital juga membawa tantangan etis dan kelembagaan. Di satu sisi, teknologi meningkatkan efisiensi dan inklusivitas, namun di sisi lain, ia dapat mengaburkan nilai-nilai relasional dalam memberi. Makna terdalam dari filantropi terletak pada perhatian dan keterlibatan, bukan sekadar transfer dana. Selain itu, organisasi filantropi dituntut untuk terus beradaptasi dengan cepatnya perkembangan

digital, sembari tetap menjaga nilai solidaritas di tengah masyarakat yang semakin individualistis.

Paparan langkah-langkah strategis di atas menjadi penopang ekosistem filantropi Indonesia yang dilandasi oleh budaya filantropi. Nilai-nilai seperti gotong royong dan keagamaan yang tertanam dalam budaya Indonesia merupakan modal sosial yang kuat untuk mendasari ekosistem filantropi. Namun, budaya saja tidak cukup. Agar semangat berbagi ini dapat bertahan dan berkembang secara sistematis, perlu didukung oleh langkah-langkah strategis yang terintegrasi yang meliputi pendidikan, regulasi, akuntabilitas, kolaborasi, dan digitalisasi. Pendekatan multidimensi ini akan memperkuat ekosistem filantropi sehingga lebih adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal. Hanya dengan menggabungkan kekuatan budaya dan strategi kelembagaan yang progresif, filantropi di Indonesia dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang transformatif, inklusif, dan berkelanjutan.

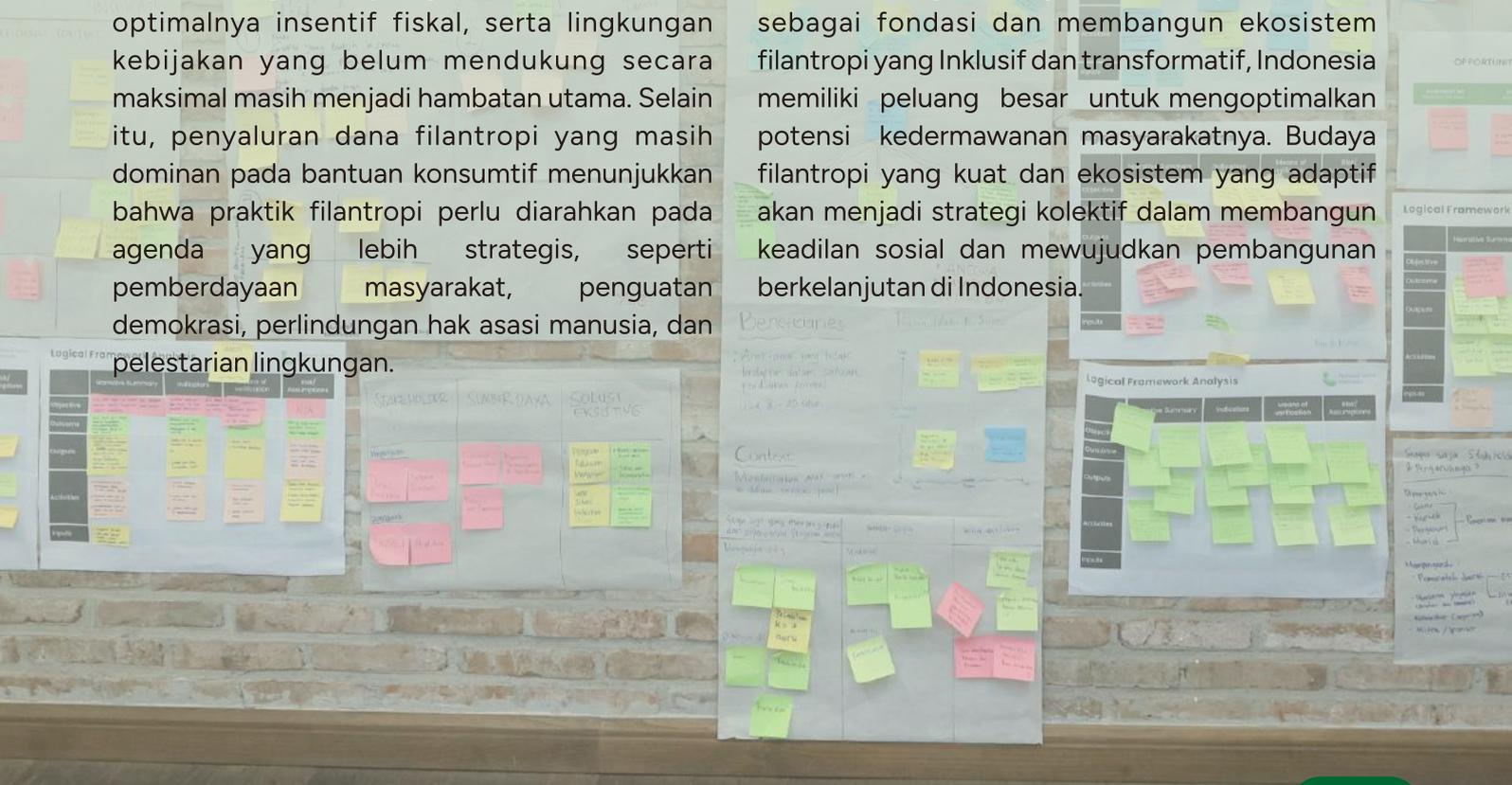
Penutup

Budaya filantropi di Indonesia telah terbukti menjadi kekuatan sosial yang sangat signifikan, terbentuk dari perpaduan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan pengalaman sejarah yang panjang. Praktik kedermawanan seperti gotong-royong, *udunan*, *badoncek*, dan berbagai bentuk solidaritas sosial lainnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia lintas generasi. Ajaran agama yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama juga menjadi pilar utama yang mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi, sebagaimana tercermin dari data bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas derma.

Namun, tingginya budaya memberi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan ekosistem filantropi yang kuat dan optimal. Tantangan seperti regulasi yang kompleks, belum optimalnya insentif fiskal, serta lingkungan kebijakan yang belum mendukung secara maksimal masih menjadi hambatan utama. Selain itu, penyaluran dana filantropi yang masih dominan pada bantuan konsumtif menunjukkan bahwa praktik filantropi perlu diarahkan pada agenda yang lebih strategis, seperti pemberdayaan masyarakat, penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan.

sangat penting untuk menegaskan bahwa budaya filantropi harus dijadikan fondasi utama dalam pembentukan ekosistem filantropi Indonesia. Budaya yang telah mengakar kuat ini merupakan modal sosial yang tak ternilai, yang dapat menjadi basis untuk membangun sistem filantropi yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa fondasi budaya yang kuat, ekosistem filantropi akan rapuh dan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai budaya filantropi harus menjadi prioritas dalam setiap upaya memperkuat ekosistem filantropi nasional.

Selain itu, perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi menuntut adanya pembentukan ekosistem filantropi Inklusif dan transformatif. Ekosistem ini menggabungkan kekuatan tradisi lokal dan nilai-nilai agama dengan inovasi, teknologi, dan praktik-praktik filantropi modern. Dengan menjadikan budaya filantropi sebagai fondasi dan membangun ekosistem filantropi yang Inklusif dan transformatif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi kedermawanan masyarakatnya. Budaya filantropi yang kuat dan ekosistem yang adaptif akan menjadi strategi kolektif dalam membangun keadilan sosial dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



PIAGAM BUDAYA FILANTROPI

1. BUDAYA FILANTROPI INDONESIA SEBAGAI KRISTALISASI NILAI KOMUNAL SEJARAH BANGSA

Budaya Filantropi Indonesia adalah cara luhur bangsa dalam memaknai pemberian yang bersifat pribadi dan berdampak pada kepentingan umum. Budaya ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai komunal yang telah mengakar dalam dinamika sosial, ekonomi dan politik sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

2. ELEMEN-ELEMEN NILAI SEBAGAI API ABADI FILANTROPI INDONESIA

Budaya Filantropi Indonesia terbentuk dari nilai-nilai teologis, tradisi, identitas ke-Indonesia-an dan sosial psikologis. Nilai-nilai ini termanifestasi dalam praktik gotong royong, solidaritas, dan kepedulian lintas komunitas. Elemen-elemen tersebut menjadi api abadi yang terus menyalakan semangat memberi lintas generasi. Nilai ke-Indonesia-an, khususnya semangat Pancasila dan gotong royong, berperan sebagai perekat yang menyatukan keragaman dan memperkuat solidaritas sosial dalam praktik filantropi.

3. KERAGAMAN DIMENSI BUDAYA FILANTROPI INDONESIA

Praktik filantropi dijalankan oleh berbagai aktor, baik komunitas, organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, maupun sektor swasta. Bentuknya berkembang dari filantropi tradisional hingga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial. Keragaman ini melahirkan *filantropisasi*, yaitu pelembagaan nilai-nilai filantropi dalam berbagai sektor dengan motivasi beragam, mulai dari altruistik hingga pragmatis dan ideologis.

4. FILANTROPI TRADISIONAL DAN INSTITUSIONAL SEBAGAI FONDASI EKOSISTEM FILANTROPI INKLUSIF DAN TRANSFORMATIF DI INDONESIA

Keragaman dalam praktik filantropi adalah sebuah kekuatan. Filantropi tradisional yang mendominasi praktik saat ini berperan sebagai jaring pengaman sosial yang vital, praktik ini tetap dipertahankan sambil didorong dan diarahkan menuju pendistribusian dan pendayagunaan yang lebih berkelanjutan. Proses ini berjalan berdampingan dengan peran filantropi institusional yang menjadi garda depan dalam mendorong perubahan struktural yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi dan komunikasi antara keduanya menjadi fondasi untuk membangun ekosistem hibrida yang mengambil kekuatan dari filantropi tradisional dan institusional di Indonesia.

5. URGENSI PENGUATAN EKOSISTEM UNTUK DAMPAK YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Ekosistem filantropi di Indonesia masih belum cukup kokoh, meskipun ditopang oleh budaya filantropi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi besar ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Penguatan ekosistem filantropi perlu dilakukan melalui sejumlah kebijakan strategis yang mencakup pendidikan, regulasi, akuntabilitas dan transparansi, kolaborasi, serta digitalisasi. Pendekatan multidimensional ini menjadi kunci dalam mengembangkan filantropi untuk tercapainya keadilan sosial di Indonesia.

Penghargaan dan Apresiasi

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para narasumber, baik dari kalangan praktisi, akademisi, maupun pemangku kepentingan yang telah berbagi pemikiran dan pengalaman melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan forum-forum konsultatif lainnya. Masukan dan refleksi mereka menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman kolektif mengenai rekonstruksi budaya filantropi di Indonesia.

Kami juga menghargai partisipasi aktif dari berbagai lembaga filantropi, yayasan keluarga, organisasi masyarakat sipil, pelaku CSR, serta institusi pendidikan dan keagamaan, yang telah hadir dalam serangkaian forum diskusi daring pada Januari hingga Februari 2025. Kontribusi semua pihak menjadi landasan kuat dalam penyusunan gagasan menuju ekosistem filantropi yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Focus Group Discussion (FGD)

- FGD 1. (2025, 23 Januari). Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan (dengan anggota lembaga filantropi PFI). Zoom Meeting.
- FGD 2. (2025, 07 Februari). Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan (dengan lembaga filantropi berbasis yayasan keluarga dan CSR). Zoom Meeting.
- FGD 3. (2025, 14 Februari). Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan (dengan para stakeholder dan akademisi). Zoom Meeting.

Bibliografi

- Abdullah, T. (1986). The pesantren in historical perspective. In T. Abdullah & S. Siddique (Eds.), *Islam and society in Southeast Asia* (pp. 178–198). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Abubakar, I., & Bamualim, C. S. (Eds.). (2006). *Filantropi Islam dan keadilan sosial: Studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Achda, B. T. (2006). The sociological context of corporate social responsibility development and implementation in Indonesia. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 13(5), 300–305. <https://doi.org/10.1002/csr.110>
- Anoraga, B. (2024). A decade of charitable crowdfunding and its impacts on the social justice trajectory of Islamic philanthropy in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(1), 5–24.
- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil society capacity building for democratic reform: Experience and lessons from Indonesia. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 21(3), 417–439. <https://doi.org/10.1007/s11266-010-9140-1>
- Aziz, A., Dharmayanti, D., Mualimin, J., Wartoyo, W., Prabuwo, A. S., & Hidayat, A. (2024). Analysis of the factors influencing the philanthropy behavior in the industrial revolution era 4.0. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 2904–2923. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00213>
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Mizan.
- Badan Pusat Statistik. (2025, Januari 15). *Berita resmi statistik: Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.
- Badan Pusat Statistik RI. (2021). *Statistik modal sosial 2021*. Badan Pusat Statistik RI.
- Barman, E. (2017). The social bases of philanthropy. *Annual Review of Sociology*, 43(1), 271–290. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053334>
- Bird, M. D., & Aninat, M. (2022). Inequality in Chile's philanthropic ecosystem: Evidence and implications. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 34(5), 974–989. <https://doi.org/10.1007/s11266-022-00541-z>
- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong Royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 45(3), 545–561.
- Bündnis Entwicklung Hilft & Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). (2023). *World Risk Report 2023: Focus – Resilient Infrastructure*. Bündnis Entwicklung Hilft. <https://weltrisikobericht.de>
- Charities Aid Foundation. (2024). *World Giving Index 2024*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi_2024_report.pdf

- Charities Aid Foundation. (2025). World Giving Report 2025. <https://www.worldgivingreport.org/>
- Center for Asian Philanthropy and Society. (2022). *Doing Good Index 2022: Assessing the health and well-being of Asia's social sector*.
- Center for Asian Philanthropy and Society. (2024). *Doing Good Index 2024: Examining the readiness of Asia's social sectors to thrive*. <https://caps.org/research/doing-good-index-2024/>
- Chhina, S., Petersik, W., Loh, J., & Evans, D. (2014). From charity to change: Social investment in selected Southeast Asian countries. Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Outlook zakat Indonesia 2025*. Jakarta, Indonesia: Puskas BAZNAS.
- Eckstein, S. (2001). Community as gift-giving: Collectivistic roots of volunteerism. *American Sociological Review*, 66(6), 829–851. <https://doi.org/10.2307/3088891>
- Fairbairn, G. (2024). Children and philanthropy: Understanding pro-social behaviours in early life and implications for future giving. *Nonprofit Management & Leadership*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/nvsm.1874>
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223-236.
- Fauzia, A., Hidayati, S., Garadian, E. A., & Anoraga, B. (2022). *Towards action: Islamic philanthropy for social justice in Indonesia*. Social Trust Fund.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Hartnell, C. (2020). *Philanthropy in Indonesia*. Association with Alliance, Filantropi Indonesia, Indonesia for Humanity, and WINGS.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hoon, C.-Y. (2010). Face, faith and forgiveness: Elite Chinese philanthropy in Indonesia. *Journal of Asian Business*, 24(1–2), 51–66.
- Hudson Institute. (2015). *The Index of Philanthropic Freedom*. The Center for Global Prosperity (CGP), Hudson Institute.
- IDEAS (Institute for Demographic and Affluence Studies). (2025). *Ekonomi Zakat Fitrah 2025: Alternatif Bantalan Ekonomi di Masa Sulit* (Policy Brief).
- Ingleson, J. (2015). Race, class and the deserving poor: Charities and the 1930s Depression in Java. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(2), 205–226. <https://doi.org/10.1017/S0022463415000053>

- Indiana University Lilly Family School of Philanthropy. (2022). *The Global Philanthropy Environment Index 2022*. IUPUI. <https://globalindices.indianapolis.iu.edu/environment-index/index.html>
- Jang, H. (2018). Old money—The history of giving in Asia. In R. A. Shapiro, M. Mirchandani, & H. Jang (Eds.), *Pragmatic philanthropy: Asian charity explained* (pp. 19–44). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7119-5_2
- Kementerian Agama RI (Kemenag). (2025). *Rekonstruksi budaya filantropi di Indonesia untuk membangun ekosistem filantropi yang berkelanjutan* [Presentasi].
- Kimmelmeier, M., Jambor, E. E., & Letner, J. (2006). Individualism and good works: Cultural variation in giving and volunteering across the United States. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 37(3), 327–344. <https://doi.org/10.1177/0022022106286929>
- Kurniati, P., Sapriya, S., Darmawan, C., Pratomo, W., & Putra, H. M. (2022). Strengthening Pancasila philanthropy in the millennial generation to develop citizenship character. In Proceedings of the 4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_90
- Latief, H. (2013). Agama dan pelayanan sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189.
- Latief, H. (2016). Transforming the culture of giving in Indonesia: The Muslim middle class, crisis, and philanthropy. *Bulletin of the Nanzan Center for Asia-Pacific Studies*, 11, 1–21.
- Latief, H. (2023). Reconsidering Muslim philanthropy and sustainable development in Indonesia. In *Political Science and Public Policy 2023* (pp. 307–322). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035306572.00028>
- Lew, S., & Wójcik, D. (2009). *The cultures of philanthropy: Private foundation governance in the USA, the UK, Germany, and Japan*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1508858>
- Nofitariani, H. E., Chairunnisa, D. R., & Nasution, P. I. (2024). Charitable donation behavior in Indonesia: Generational insights. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 16(2s), 24.
- Odendahl, T. (1989). The culture of elite philanthropy in the Reagan years. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 18(3), 237–248. <https://doi.org/10.1177/089976408901800305>
- Osili, U., Ökten, Ç. (2015). Giving in Indonesia: A Culture of Philanthropy Rooted in Islamic Tradition. In: Wiepking, P., Handy, F. (eds) *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137341532_23
- Payton, R. L., & Moody, M. P. (2008). *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. Indiana University Press.
- Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2024). *Indonesia Philanthropy Outlook 2024: Progress, tren, dan agenda prioritas untuk pencapaian SDGs*. Perhimpunan Filantropi Indonesia.
- Pew Research Center. (2012, August 9). *The world's Muslims: Unity and diversity*

- PIRAC. (2002). *Giving and Fund Raising in Indonesia: Investing in Ourselves*. Jakarta: PIRAC.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Raddon, M. B. (2023). "Do or die": Creating a culture of philanthropy. In *The business of hope*. Palgrave Macmillan. Palgrave Studies in Third Sector Research.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Sakai, M. (2012). Building a partnership for social service delivery in Indonesia: State and faith-based organisations. *Australian Journal of Social Issues*, 47(3), 373–388.
- Sciortino, R. (2017). Philanthropy in Southeast Asia: Between charitable values, corporate interests, and development aspirations. *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 139–163. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2007.2-2>
- Shapiro, R. A., Mirchandani, M., & Jang, H. (2018). *Pragmatic philanthropy: Asian charity explained*. Springer Singapore: Imprint: Palgrave Macmillan.
- Sitorus, S., & Abidin, H. (2022, Maret 30). The 2022 Global Philanthropy Environment Index: Indonesia [Laporan]. IU Lilly Family School of Philanthropy.
- Soskis, B. (2018). *Analyzing a localized giving culture: The case of Washington, DC*. Urban Institute.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Projo, N. (2020). Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: The case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>
- Van der Eng, P. (2023). *Corporate social responsibility in Indonesia: Historical experiences, 1900s–1950s* (CEH Discussion Papers No. 06). Centre for Economic History, Research School of Economics, Australian National University.
- Wiepking, P. (2021). The global study of philanthropic behavior. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 32(1), 194–203. <https://doi.org/10.1007/s11266-020-00279-6>
- Wolpert, J. (1995). *Giving and region: Generous and stingy communities*. *New Directions for Philanthropic Fundraising*, 1995(7), 11–30.
- World Bank. (2025, April). *Macro Poverty Outlook: Country-by-country analysis and projections for the developing world*. <https://www.worldbank.org/en/publication/macro-poverty-outlook>
- World Values Survey. (2022). *World Values Survey Wave 7 (2017–2022): Official aggregate v5.0 [Data set]*. World Values Survey Association. <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp>

Budaya Filantropi Indonesia: Rekonstruksi untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan



Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720

E-mail: info@filantropi.or.id

Telp. (021) 6287234